

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Agency Theory*

Ekonomi merupakan upaya manusia dalam memenuhi hidupnya. Prinsip ekonomi mendasari aktivitas tindakan manusia. Prinsip ekonomi menjelaskan bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas. Dapat juga dikatakan manusia berusaha memenuhi kebutuhannya tentu dengan meminimalkan sumber daya yang di gunakan. Manusia akan selalu berusaha dengan sumber daya yang terbatas dapat mengoptimalkan kebutuhannya. Bagi investor yang merupakan pemilik sumber daya yang berupa dana, tentunya akan berusaha mengoptimalkan hasil dari apa yang telah diinvestasikan. Oleh sebab itu investor akan memilih berinvestasi pada proyek-proyek yang memberikan keuntungan atau kenaikan nilai investasi dimasa yang akan datang. Manajemen atau entitas berusaha untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki agar dapat menghasilkan keuntungan yang optimal dari entitas tersebut.¹ Dalam literatur akuntansi pemisahan kepemilikan dan manajemen disebut dengan *Agency Theory* (teori keagenan).

Pengertian teori keagenan menurut para ahli:

1. Menurut Scott, adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal adalah pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan prinsipal.
2. Menurut Jense dan Meckling, hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau beberapa orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen.
3. Menurut Einsenhardt, adalah hubungan yang mencerminkan struktur dasar keagenan antara prinsipal dan agen yang terlibat dalam perilaku yang kooperatif,

¹ Dwi Martini, Dkk, *Akuntansi keuangan menengah*, (Jakarta: Salemba Empat'2016), 12

tetapi memiliki perbedaan tujuan dan perbedaan sikap terhadap resiko.²

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa teori keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen, yang mana prinsipal mempekerjakan serta memberikan hak pengambilan keputusan terhadap agen berdasarkan kepentingan prinsipal.

Pihak prinsipal yang merupakan pemegang saham, akan melimpahkan tugas pengelolaan perusahaan kepada manajer yang bertindak sebagai pihak agen yang nantinya diharapkan pihak manajer akan bertindak atas nama pemilik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Namun pada praktiknya, pihak manajemen lebih cenderung bertindak untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi. Pada teori keagenan, setiap pihak diasumsikan selalu bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sehingga hal tersebut mengakibatkan terciptanya konflik keagenan atau *agency problem*.³

Dalam pengembangan teori keagenan menyatakan bahwasannya manajemen dan prinsipal akan akan berusaha untuk memaksimalkan utilitas masing-masing melalui informasi yang dimiliki. Akan tetapi karena manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal dapat memicu para agen untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai keinginan serta kepentingan mereka sendiri untuk memaksimalkan utilitasnya tanpa memperhatikan risiko yang nantinya akan berdampak pada perusahaan. Investor tentunya akan sulit untuk mengontrol secara efektif dari tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Hal inilah yang menyebabkan para prinsipal akan berusaha mengatasi

² <http://artikelpendidikan.id/teori-agensi/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020, 22:10 WIB.

³ herawaty, Vinola, Peran Praktik Corporate Governance sebagai Moderating Variabel dari Pengaruh Earnings Manajement terhadap Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak 2010, 14

permasalahan tersebut dengan melakukan pengawasan kepada manajemen dalam melakukan manajemen risiko.⁴

Ketidakseimbangan informasi akan memicu munculnya asimetri informasi (*information asymetry*), yaitu antara manajemen dan pemilik perusahaan yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik/pemegang saham mengenai kinerja perusahaan.⁵

Terdapat tiga asumsi yang dijadikan landasan dalam teori keagenan, yaitu:

1. Asumsi sifat manusia
Asumsi ini lebih condong pada kepentingan pribadi, memiliki keterbatasan rasional, dan tidak suka akan adanya resiko.
2. Asumsi keorganisasian
Asumsi ini menekankan adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai tolak ukur efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.
3. Asumsi informasi
Asumsi ini mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan.

B. Biaya Keagenan

Biaya keagenan adalah biaya yang timbul akibat konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Biaya keagenan mengacu pada biaya-biaya yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan manajemen, terutama timbul karena biaya kontrak dan perbedaan kontrol, pemisahan kepemilikan dan kontrol, dan adanya perbedaan tujuan manajemen.⁶

⁴ Kadek Budi suryanata, dkk, “Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan dan Pengungkapan CSR Terhadap Manajemen Resiko dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi”, *Jurnal Akuntansi*, Vol 28 No. 3 (2019) 2028

⁵ Maf’ul Taufiq, dkk, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol 7 No. 1 (2014), 69

⁶ Masyiah Kholmi, “Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi”, *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vol 2 No. 2 (2010), 172

Klasifikasi biaya keagenan yaitu: biaya pemantauan terhadap manajer, biaya ikatan, serta kehilangan sia-sia.⁷ Sehingga mengakibatkan *Agenci Cost of Equaity*, yaitu suatu hasil dari pengurangan nilai perusahaan (*reduction in firm's value*), dampak dari manajemen yang lebih mementingkan kepentingannya pribadi daripada kepentingan *shareholders*.⁸

Bentuk-bentuk biaya keagenan diantaranya yaitu:

1. Biaya pemantauan
Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memantau manajer dengan cara mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku manajer.
2. Biaya penjamin
Adalah biaya yang muncul untuk menjamin manajer agar mengambil keputusan yang tidak merugikan dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.
3. Kerugian residu
Adalah biaya mengenai kerugian yang ditanggung meskipun pemantauan dan penjaminan telah dilaksanakan.

Masalah keagenan muncul dalam berbagai tipe, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konflik antara manajer dan pemegang saham
Konflik ini terjadi karena manajer memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, akan tetapi terkadang manajer dalam pengambilan keputusan lebih condong pada kepentingan pribadi dibandingkan untuk kepentingan pemilik saham.
2. Konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas
Pemegang saham mayoritas yang biasanya menjadi manajer di perusahaan dapat mengambil keputusan yang hanya menuntungkan bagi pemegang saham mayoritas.
3. Konflik antara pemegang saham dengan pemberi pinjaman

⁷ Yuni Kusuma Arumsari, " Pengaruh Kepemilikan Managerial, Kebijakan Utang, Kebijakan Deviden Terhadap Kinerja Keuangan dan Biaya Agensi (Studi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI), Jurnal Wawasan Manajemen, Vol 2 No. 2 (2014) hal. 175

⁸ Masyiah Kholmi, "Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi", Jurnal Ekonomika-Bisnis, Vol 2 No. 2 (2010), 262

Pemberi pinjaman selalu berharap agar perusahaan berjalan dengan aman dan nantinya uang yang dipinjamkan dapat kembali, namun pemegang saham dapat saja memilih bisnis yang beresiko tinggi dengan harapan dapat memperoleh return yang lebih tinggi pula.⁹

C. *Good Corporate Governance*

Corporate governance sering kali dianggap menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan suatu perusahaan karena menjadi salah satu mekanisme yang dilakukan dalam upaya manajemen laba. Dengan penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan mampu untuk meminimalisir manajemen yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga berpotensi merugikan pihak lain.

Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topic utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat terhadap kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti halnya sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, seperti halnya karyawan atau lingkungan.

Istilah *Corporate Governance* pertama kali muncul pada tahun 1992 oleh Cadbury, yang mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu paket kebijakan yang memuat uraian mengenai hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, pekerja, dan *stakeholders* lain, baik internal maupun eksternal sebagai bentuk tanggung jawab.

⁹ Riri Rofika Ulya, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Sektor Perdagangan di BEI". Skripsi, (Surabaya: STIE Perbanas, 2016), 4

Berdasarkan dengan Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002 *Good Corporate Governance* dapat di definisikan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang serta dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.¹⁰

Sedangkan menurut Mink dan Minow, *Good Corporate Governance* yaitu mekanisme pengendalian dalam mengatur dan mengelola perusahaan dalam meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan dengan harapan agar bisa mewujudkan *shareholders value*. Pengendalian yang dimaksud yaitu pengawasan terhadap perilaku manajer supaya tindakan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pemiliknya. *Corporate Governance* sendiri menyangkut hal-hal terkait siapa dan mengapa, yaitu siapa yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan mengapa harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan siapa adalah para pemegang saham, sedangkan mengapa adalah terkait dengan hubungan antara pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.¹¹

Dengan kata lain, *Good Corporate Governance* secara singkat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

¹⁰ Vivi Widiyaningsih, Supri Wahyudi Utomo, "Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2011), Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol 2 No. 2 (2013),.72

¹¹ Nuryaman, "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Management Laba. Simposium Nasional Akuntansi XI", Jurnal Akuntansi, Vol 2 No. 2 (2008), 69

1. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Menteri BUMN No. Kep.117/M-MBU/2002, prinsip *Good Corporate Governance* merupakan kaidah, norma atau pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem *pengelolaan* BUMN yang sehat.

Penggunaan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan konsep *Good Corporate Governance*, setidaknya terdapat 5 pilar dasar dari *Good Corporate Governance* yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang sering kita dengar dengan konsep TARIF, yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*¹² dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Transparency*

Konsep transparansi diperlukan untuk menjaga objektivitas suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan.

b. *Accountability*

Adanya konsep ini yaitu untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, suatu kinerja haruslah dikelola dengan tepat, terukur, dan terencana untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang telah dilakukan.

c. *Responsibility*

Dalam konsep ini, individu maupun perusahaan memiliki tanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugasnya, mematuhi segala aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan.

d. *Independency*

¹² Anonymous. 2005. Laporan Tahunan Link Net 2014. http://www.linknet.co.id/pdf/93/01/52/6_Tata_Kelola_Perusahaan_GCG.pdf. Diakses pada 25 Mei 2020 pukul 22:00 WIB

Konsep ini mengharuskan perusahaan untuk memiliki tata kelola yang efektif dan efisien serta mampu melakukannya sendiri tanpa adanya dominasi ataupun tekanan dari pihak lain dan mampu memanfaatkan nilai-nilai (*values*) yang ada pada perusahaan untuk dapat dimanfaatkan *unique point* diantara perusahaan yang lain sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis yang sama.

e. *Fairness*

Dalam konsep ini berguna untuk menjaga stabilitas perusahaan diharuskan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, para pemangku kepentingan lainnya karena mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk perusahaan. Sehingga setiap individu dapat terpacu untuk memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah:¹³

- 1) Memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya
- 2) Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya

¹³ Riska Franita, Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi (Medan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan AQLI, 2008), 10

- perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan
- 3) Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

Berdasarkan konsep dari Good Corporate Governance, konsep ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan perusahaan, yang mana konsep ini dapat dijadikan untuk melihat sejauh mana kesesuaian dan penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Konsep ini juga dapat digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dalam mengelola sumber daya yang tersedia dan dapat diinformasikan, dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanyakan alokasinya kepada para pemangku kepentingan. Disamping itu, melalui konsep ini pula sejauh mana perusahaan mampu melakukan tata kelolanya sendiri dan tetap dalam jalur yang tepat dalam jalur yang tepat dalam mencapai tujuan, dengan memperhatikan penyertaan kesempatan yang ada kepada seluruh bagian perusahaan yang disesuaikan pada porsi dan kemampuan masing-masing.

2. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan penerapan konsep *Good Corporate Governance* yaitu untuk mencapai perusahaan yang lebih *transparan* bagi semua pemangku kepentingan. Dengan penerapan konsep ini secara baik, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bersama dengan adanya transparansi dalam pengelolaan perusahaan yang semakin baik. Sehingga pada akhirnya mampu menciptakan kondisi yang menguntungkan semua pihak yang berkepentingan didalamnya, dan dari konsep inilah penerapan *Good Corporate Governance* dipercaya mampu meningkatkan nilai perusahaan.¹⁴

¹⁴ Siallagang, Hamonang dan Machfodz, Mas'ud. 2006. Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasioanl Akuntansi IX. Padang, K-AKPM 13.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konkret memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan akses bagi investor domestik maupun asing.
- b. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
- c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- d. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
- e. Melindungi komisaris dan direksi dari tuntutan hukum.

3. Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* yaitu diantaranya:

- a. Dapat mengurangi *agency cost*

Yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham sebagai akibat dari pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya tersebut dapat berupa kerugian yang timbul akibat dari penyalahgunaan wewenang ataupun biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh pemegang saham.

- b. Dapat mengurangi biaya modal

Yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik akan menyebabkan tingkat suku bunga atas dana atau sumber yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan menurunnya tingkat risiko perusahaan.¹⁵

4. *Islamic Good Corporate Governance*

Islamic good corporate governance merupakan perkembangan lanjutan dari konsep *Good Corporate Governance*. Yang disebut terakhir ini terkait dengan seperangkat aturan atau sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip dan kebijakan yang benar. Langkah menuju terbentuknya *Islamic*

¹⁵ Riri Rofika Ulya, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Sektor Perdagangan di BEI". Skripsi, (Surabaya: STIE Perbanas, 2016), 5

Corporate Governance diawali dengan spiritualisasi perusahaan, sebuah sistem tata kelola perusahaan yang dalam perspektif Islam berdasarkan pada paradigma tauhid (monoteisme murni), dan digagas untuk menjadi alternatif *Corporate Governance* dalam perusahaan kapitalis yang didasarkan pada pemikiran syirik (pseudi monotheism dan politheism). *Islamic Corporate Governance* merupakan konsep organisasi dan manajemen profetik yang serba melingkupi semua kegiatan, baik internal maupun eksternal, bisnis perusahaan. Di dalamnya terkandung makna sistem, struktur, proses atau mekanisme, perilaku dan budaya yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan sehingga bekerja secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan para stakeholder.¹⁶

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak tererosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai Good Corporate Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:¹⁷

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبراني)

Dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang apabila ia mengerjakan sesuatu, ia mengerjakannya dengan itqan.” (HR. Thabrani).

¹⁶ Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management: From Personal Enlightenment Towards Islamic Corporate Governance*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 201

¹⁷ Abu Kasim Sulaiman bin Ahmad Tabrani, *Al-Mu‘jam Al Wusta*, (Kairo: Dar Harmin, 1415), 275

a. Prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance

Muqorobin menyatakan bahwa Good Corporate Governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini :

1) Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya.²⁸ Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Az-Zumar [39]: 38 yang berbunyi:¹⁸

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوُنَّ اللّٰهَ فَاَلْفَرَوٰنٰتُهُمْ مَا تَدَّ
عُوُنَ مِنْ دُوُنِ اللّٰهِ اِنْ اَرٰا دِيْنَ اللّٰهِ بِضُرِّهٰلْ هُنَّ كُنٰتُفُ ضُرِّهٖ اَوْ اَرٰا دِيْنَ
بِرٰحْمٰةِ هٰلْ هُنَّ مُنٰسِكٰتُ رٰحْمٰتِهٖ فَاَلْحَسْبِي اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوُنَ (٣٨)

Artinya: *“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.”*

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bogor : Syamil Quran, 2007), 462

adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.¹⁹

2) Taqwa dan ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya.

Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas pondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam Q.S. At-Taubah [9]: 109 yang artinya: *“Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”*

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

¹⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. (Jakarta: Kencana. 2012), h. 5-6

3) *Ekuilibrimum* (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-ʿadl*, *adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-ʿadl*, *adalah* atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rahman [55]: 7-9²⁰ yang berbunyi:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا
الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

4) *Kemaslahatan*

Secara umum, *mashlahat* diartikan sebagai kebaikan mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufسادah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa *mashlahat* adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni :

a) Pemeliharaan agama (*hifdzud-din*), yang terkait pula dengan pemeliharaan sarana

²⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qurʿan dan Terjemahan, 204

dan prasarana ibadah dan ketentuan lainnya dalam ajaran Islam.

- b) pemeliharaan jiwa (*hifhzun-nafs*), yang berimplikasi pada aspek kesehatan.
- c) pemeliharaan akal (*hifhzul-'aql*), melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d) pemeliharaan keturunan (*hifhzun-nasl*), melalui pemeliharaan kesehatan.
- e) pemeliharaan harta benda (*hifhzul-maal*), termasuk dalam hal pengembangan ekonomi dan bisnis.²¹

5. Penerapan Mekanisme *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan mampu mengurangi *agency problem* sampai pada titik terendah. *Agency problem* dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen, sehingga dengan penerapan *Good Corporate Governance* dapat menjadi solusi akan adanya permasalahan tersebut.²²

Pada dasarnya *good corporate governance* merupakan suatu sistem (*input, process, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan didalamnya, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* dimasukan untuk mengatur hubungan pihak-pihak yang berkepentingan dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa

²¹ Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 58

²² Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . "Journal of Financial Economics", Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp.305-360.

kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dapat diperbaiki dengan segera.²³

Agar *Corporate Governance* dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka ada beberapa faktor yang berperan penting untuk mencapai tujuan dari *Corporate Governance*, sehingga *Corporate Governance* dapat berjalan dengan baik. Diantaranya adalah:

a. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan.

Menurut teori keagenan, konflik antara pemegang saham dan manajemen dapat dikurangi dengan cara mensejajarkan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Adanya kepemilikan saham oleh manajerial dapat digunakan untuk mengurangi timbulnya *agency cost*, karena adanya saham perusahaan yang dimiliki manajerial diharapkan manajer dapat merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini disebut dengan *Bonding Mechanism*, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan.²⁴

Dengan besarnya kepemilikan manajerial dapat memungkinkan adanya penyatuan kepentingan antar manajer dan pemegang saham, yang berarti makin tingginya proporsi kepemilikan saham manajerial maka manajer akan berupaya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan dirinya sendiri. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam suatu perusahaan dapat mengidentifikasi adanya kesamaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen.

²³ Prasetyantoko, *Coporate Governance: Pendekatan Institusional*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 18

²⁴ Triska Dewi Pramasari, dkk, "Model Prediksi Kepemilikan Manajerial dengan Teknik Analisis Multinomial Logistik", *Jurnal Ekonomi*, Vol 2 No.1 (2016), 37

Kepemilikan saham manajerial yang besar dalam perusahaan haarusnya memiliki konflik keagenan yang rendah dan biaya keagenan yang rendah. Konflik keagenan yang rendah dapat direfleksikan dengan tingginya tingkat perputaran aktiva perusahaan.²⁵

Selain itu mampu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu meningkatkan rasio perputaran aset yang dimiliki perusahaan.

b. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh publik. Persentase kepemilikan publik yang ada di sebuah perusahaan dapat memonitoring perusahaan dengan adanya kepemilikan publik yang besar. Maka semakin banyak pula pengawasan yang dilakukan dan perusahaan juga harus dapat pula mengungkapkan seluruh informasi yang diperlukan oleh pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan publik diharapkan perusahaan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaan yang akan berdampak terhadap nilai perusahaan dan dengan adanya pengawasan oleh pihak kepemilikan publik terhadap pihak manajemen dapat membuat pihak manajemen lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan.²⁶

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan pemborosan yang dilakukan oleh manajemen karena semakin besar kepemilikan manajerial mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen dan nantinya mampu

²⁵ Riri Rofika Ulya, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Sektor Perdagangan di BEI". Skripsi, (Surabaya: STIE Perbanas, 2016), 6-7

²⁶ Riska Franita, Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi (Medan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan AQLI, 2008), 15

mengurangi perilaku *opportunistic manager* yang dapat mengurangi *agency cost*.²⁷

c. Dewan komisaris

Salah satu mekanisme yang digunakan dalam memonitor kinerja manajer adalah dengan pembentukan dewan komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta BEJ No: Kep-315/BEJ/06-2000, mengharuskan perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk memiliki dewan komisaris yang nantinya memonitor perusahaan agar terciptanya *Good Corporate Governance* di Indonesia. Secara hukum tugas dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dalam hal ini dewan komisaris harus dapat memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau pengawasan otoritas lain.²⁸

Dewan komisaris yang besar dalam perusahaan mampu menstimulus pertukaran informasi antar dewan dengan adanya perpaduan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam proses pengambilan keputusan. sehingga dewan komisaris lebih mengetahui bagaimana kondisi perusahaan yang tengah dihadapi dan pada akhirnya mampu menghasilkan keputusan yang efektif.²⁹

Tugas utama dewan komisaris yaitu:

²⁷ Riri Rofika Ulya, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Sektor Perdagangan di BEI". Skripsi, (Surabaya: STIE Perbanas, 2016), 7

²⁸ Andri Veno, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Go Public (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2011 sampai 2013)", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 19 No.1 (2015), 100

²⁹ Maria Nindya Kirana, Sugeng Wahyudi. "Analisis Pengaruh *Corporate Governance* dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus pada Perusahaan Wholesale dan Retail Trade yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014)", *Jurnal Of Manajemen*, Vol 5 No.4 (2016), 4

- 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, memonitoring penggunaan modal perusahaan, investasi, dan penjualan aset.
- 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian dewan direksi yang transparan dan adil.
- 3) Memonitor dan mengatasi benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
- 4) Memonitor pelaksanaan *governance* dan mengadakan perubahan apabila diperlukan.
- 5) Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan.

Dalam implementasinya dewan komisaris di dukung oleh komite-komite khusus. Adanya komite khusus merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan dewan komisaris secara lebih rinci dengan memutuskan perhatian dewan komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik oleh manajemen. Komite-komite khusus diantaranya adalah komite audit.³⁰

d. Komite audit

Menurut Bapepam No. Kep-29/M/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Pembentukan komite audit sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di dunia termasuk di Indonesia, seiring dengan menguatnya tuntutan

³⁰ Riska Franita, Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi (Medan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan AQLI, 2008), 12-13

agar kinerja perusahaan lebih transparan dan *reliable*.³¹

Pedoman Good Corporate Governance tidak mnegatur banyaknya anggota komite audit dalam suatu perusahaannamun harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan memngelola dana masyarakat, perusahaan yang produk dan jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Pengaturan jumlah komite audit dibagi emiten dan perusahaan public diatur dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan public diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan komisaris independenperusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit.

Adapun persyaratan anggota komite audit diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya
- 2) Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik
- 3) Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan

³¹ Andri Veno, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Go Public (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2011 sampai 2013” , Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 19 No.1 (2015), 100-101

- 4) Memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
- 5) Salah satu anggota memiliki latar belakang pendidikan akuntan atau keuangan
- 6) Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, konsultan hukum maupun pihak lain yang memberikan jasa audit, non audit maupun jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan public dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat
- 7) Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua dengan direksi, komisaris, dan pemegang saham utama emiten maupun perusahaan public
- 8) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha emiten maupun perusahaan public
- 9) Tidak memiliki saham emiten atau perusahaan public baik langsung maupun tidak langsung
- 10) Bukan orang yang berwenang dan bertanggungjawab merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan emiten maupun perusahaan public dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat.

Keberadaan komite audit diharapkan memberikan nilai tambah terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang pada akhirnya dapat membatasi atau bahkan mencegah manajemen laba. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris yang antara lain meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di

bidang pasar modal dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perusahaan.

- 3) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.³²

Corporate governance yang merupakan sebagai efektivitas mekanisme yang dimanfaatkan untuk meminimalisir konflik keagenan, dengan adanya penekanan khusus pada mekanisme legal yang dapat mencegah eksplorasi atas pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas. *Good Corporate Governance* adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antar manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. *Good Corporate Governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan saran-saran dari perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring.³³

D. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang didirikan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berarti, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu

³² Riska Franita, Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi (Medan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan AQLI, 2008), 14

³³ Andri Veno, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Go Public (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2011 sampai 2013)", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 19 No.1 (2015), 97-98

setiap bulan Mei dan November atau mengikuti jadwal review DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi, selalu ada saham syariah yang keluar dan masuk menjadi konstituen ISSI. Metode perhitungan ISSI yaitu mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar yang menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI.³⁴

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari perbandingan yang selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Diyah Pujiati dan Riri Rofika Ulfa (2016)	<i>The Effect Of Corporate Governance At Agency Cost Of Trading Companies</i>	1. Pada variabel jumlah rapat dewan komisaris yang diuji menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap biaya keagenan yang diproyeksikan dengan rasio biaya operasional. Namun hasil berbeda ditunjukkan pada variabel jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan yang diproyeksikan dengan rasio perputaran aset.

³⁴ <http://www.idx.co.id>.

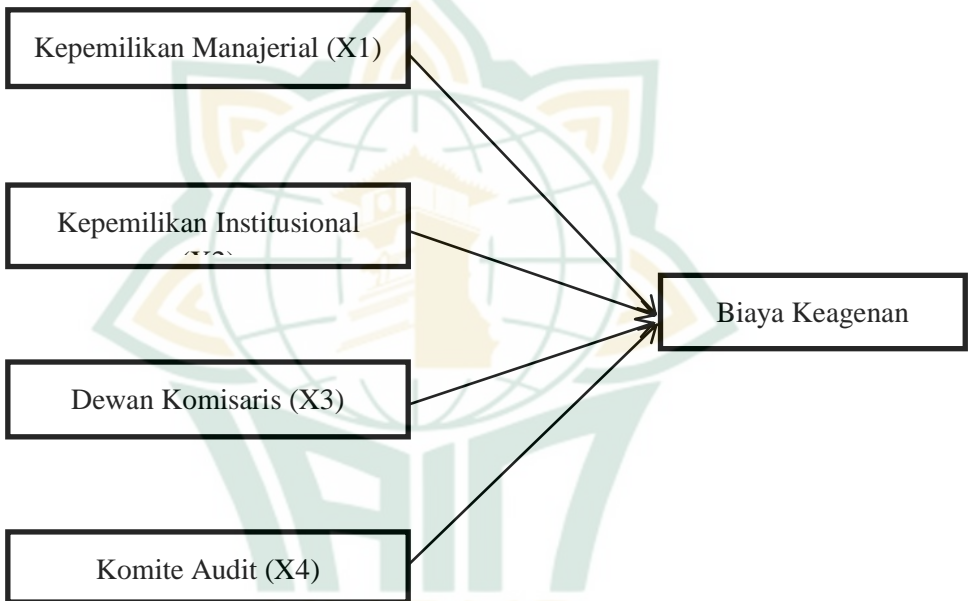
		<p>2. Pada variabel kepemilikan manajerial yang diuji menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap biaya keagenan yang diproyeksikan dengan rasio biaya operasional maupun rasio perputaran aset.</p> <p>3. Pada variabel kepemilikan institusional yang diuji menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap biaya keagenan yang diproyeksikan dengan rasio biaya operasional maupun rasio perputaran aset.</p>
Fitri Laela Wijayati (2015)	Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Instotusional, Ukuran Dewan Direksi, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Biaya Keagenan.	Berdasarkan hasil analisis pengaruh dari variabel-variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap biaya keagenan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Variabel kepemilikan manajerial dan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya keagenan, sedangkan

		kepemilikan institusional dan dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya keagenan.
Febri Rislina (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Kebijakan Hutang Terhadap <i>Agency Cost</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki hubungan negatif terhadap <i>Agency Cost</i>. 2. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki hubungan negatif terhadap <i>Agency Cost</i>. 3. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Ukuran Dewan Direksi memiliki hubungan negatif terhadap <i>Agency Cost</i>. 4. Penelitian ini mengindikasikan bahwa <i>Debt to Equity Ratio</i> memiliki hubungan negative terhadap <i>Agency Cost</i>. 5. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh yang signifikan dari variabel Ukuran Dewan Direksi dan <i>Debt to Equity Ratio</i> terhadap <i>Agency Cost</i> perusahaan.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁵ Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, Hipotesis dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya keagenan
Menurut Fitri Laela Wijayati (2015) besarnya kepemilikan manajerial akan dapat memungkinkan adanya penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajerial maka manajemen akan berupaya dengan giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 88

juga dirinya sendiri, sehingga dapat mengurangi biaya keagenan. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengidentifikasi adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial yang tinggi dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan akan mengidentifikasikan rendahnya biaya keagenan.³⁶

Menurut Hamdani (2016) menyatakan bahwa apabila terdapat kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka akan dapat mengurangi biaya keagenan karena manajemen memiliki kepentingan yang sama dengan para pemilik.³⁷

Sedangkan menurut Jessica (2014) menyatakan bahwa dengan besarnya kepemilikan manajerial dapat memungkinkan adanya penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham manajerial maka akan berupaya dengan giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan juga dirinya sendiri, sehingga dapat mengurangi biaya keagenan.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya keagenan.

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya keagenan

Kepemilikan saham institusional yang besar akan semakin insentif dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Menurut Etha Rizki Aryani (2011) semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat

³⁶ Fitri Laela Wijayati, Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris terhadap Biaya Keagenan, *Jurnal EBBANK*(2015), Vol. 6 No. 2, 3

³⁷ Hamdani, S.E.,M.M., M. Ak. Good Corporate Governance, Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 134

³⁸ Jessica, Handoko, Pengaruh Struktur Modal dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Agency Cost Perusahaan LQ45 di BEI Tahun 2013. *Jurnal Bussines and Economic Transformation Towards AEC 2015*, (2014), 145

bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin tinggi kepemilikan institusional akan dapat mengurangi perilaku *opportunistic* manajer sehingga dapat mengurangi biaya keagenan.³⁹

Menurut Putri dan Natsir (2016) mengemukakan bahwa salah satu mekanisme pengawasan dari pihak eksternal perusahaan adalah dengan mengaktifkan pengawasan melalui investor institusional. Kepemilikan perusahaan oleh institusi akan mendorong pengawasan yang lebih efektif, karena institusi merupakan pihak yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.⁴⁰ Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnauli (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap biaya keagenan pada suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap biaya keagenan.

3. Pengaruh dewan komisaris terhadap biaya keagenan

Tugas dari dewan komisaris yaitu untuk menjamin bahwa strategi yang dibentuk untuk perusahaan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola perusahaan. Dewan komisaris mewakili pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, sehingga dewan komisaris merupakan alat pengendalian dan merupakan elemen yang sangat penting dalam mekanisme internal *Corporate Governance*.⁴¹

³⁹ Etha Rizki Aryani, pengaruh *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap Agency Cost, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011) 19

⁴⁰ Putri, I. M., dan Natsir, Mohammad, Analisis Persamaan Simultan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, Kebijakan Hutang, dan Kebijakan Deviden dalam Perspektif Teori Keagenan. Simposium Nasional Akuntansi IX Ikatan Akuntan Indonesia (2006), 129

⁴¹ Ardi Setiawan, Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Rasio Keuangan terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2012-2015, Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017). 42

Menurut Zaman (2014) menyatakan bahwa komponen ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan.⁴² Menurut Pratiwi dan Arif (2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya keagenan.⁴³ Sedangkan menurut Linda (2012) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya keagenan.⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya keagenan.

4. Pengaruh komite audit terhadap biaya keagenan

Menurut Wicaksono (2014) Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas dan transparansi dari masalah keuangan. Komite audit harus independen dan bebas dari pengaruh kepentingan lain. Dalam hal ini jumlah komite audit dapat menekan biaya keagenan karena pengawasan intensif dapat mengurangi permasalahan ini.⁴⁵ Menurut Nasir (2013) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap biaya keagenan.⁴⁶ Sedangkan menurut Krisnuali (2014) menyatakan bahwa jumlah komite audit dapat menekan biaya keagenan.⁴⁷

⁴² Zaman B., Pengaruh Mekanisme Internal Corporate Governance terhadap Agency Cost (Study pada Perusahaan Manufaktur di BEI), Nusantara of Research, 2014, Volume 01, No. 02

⁴³ Peatiwi dan Arif, Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Komisaris Independen terhadap Biaya Keagenan Perusahaan yang Masuk dalam Indonesia Most Trusted Compaines, *Manajemen Analysis Journal* 5, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016)

⁴⁴ Linda, Mekanisme Corporate Governance dan Biaya Agensi, *Simposium Nasional Akuntansi XV*, (Banjarmasin, 2012)

⁴⁵ Wicaksono, Tangguh, Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Perusahaan (*Studi Empiris pada Perusahaan Peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI Tahun 2012)*), Skripsi, (Semarang: universitas Diponegoro, 2014) Hal. 24

⁴⁶ Nasir, Internal Corporate Governance Mecanism and Agency Cost: Evidence From large KSE Listed Firm. *European Journal of Busines and Manajement*, 2013.

⁴⁷ Krisnuali, Pengaruh Mekanisme Tata Kelola dan Struktur Kepemilikan terhadap Agency Cost (Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:
H4: Komite audit berpengaruh positif terhadap biaya keagenan

